

---

## **Dampak Liberalisasi Ekonomi terhadap Kesenjangan Sosial di Negara Kapitalis: Tinjauan Teoritis dan Empiris**

**Suci Komariyah<sup>\*1</sup>, Nazwa Lulu Asqa Azizah<sup>2</sup>, Suraida Kazimah<sup>3</sup> Cut Misni Mulasiwi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

\* Corresponding Author. Email: [nazwa.azizah@mhs.unsoed.ac.id](mailto:nazwa.azizah@mhs.unsoed.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis mengenai dampak liberalisasi ekonomi terhadap kesenjangan social di negara-negara kapitalis melalui pendekatan studi kualitatif berdasarkan tinjauan literatur dengan menggunakan enam negara kapitalis sebagai studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi, meskipun mendorong pertumbuhan dan efisiensi pasar, namun cenderung memperlebar ketidaksetaraan pendapatan dan kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang kuat. Contohnya di Negara Amerika Serikat dan Inggris, dimana indeks koefisien gini meningkat secara signifikan setelah liberalisasi agresif pada tahun 1980-an. Disisi lain, negara Jerman, Kanada, dan Swedia berhasil mengurasi tingkat ketimpangan melalui sistem pajak progresif, jaminan social, dan intervensi negara yang memberikan keadilan. Studi kasus di Indonesia dan Afrika juga menunjukkan bahwa liberalisasi dalam investasi asing justru memperburuk ketimpangan regional. Temuan ini menekankan bahwa dalam penerapan liberalisasi ekonomi memerlukan pendekatan kebijakan yang seimbang antara efisiensi pasar dan keadilan social untuk mencapai pembangunan inklusif.

**Kata Kunci:** Liberalisasi Ekonomi, Kesenjangan Sosial, Kapitalisme, Ekonomi Global, Dampak Liberalisasi.

### ***The Impact of Economic Liberalization on Social Inequality in Capitalist Countries: A Theoretical and Empirical Review***

**Abstract:** This study analyzes the impact of economic liberalization on social inequality in capitalist countries through a qualitative approach based on a literature review using six capitalist countries as comparative studies. The results show that economic liberalization, while promoting growth and market efficiency, tends to widen income inequality and social inequality if not balanced with strong redistribution policies. For example, in the United States and the United Kingdom, the Gini coefficient index increased significantly after aggressive liberalization in the 1980s. On the other hand, Germany, Canada, and Sweden have succeeded in reducing inequality through progressive tax systems, social security, and state interventions that promote fairness. Case studies in Indonesia and Africa also show that foreign investment liberalization has exacerbated regional inequality. These findings emphasize that the implementation of economic liberalization requires a balanced policy approach between market efficiency and social justice to achieve inclusive development.

**Keywords:** Economic Liberalization, Social Inequality, Capitalism, Global Economy, Impact of Liberalization.

---

## PENDAHULUAN

Liberalisasi ekonomi telah menjadi pondasi utama dalam kebijakan ekonomi global, liberalisme ini menekankan pada peran kekuatan pasar dan perusahaan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan adalah bentuk sistem yang menciptakan keterbukaan dan kompetitif pasar global dengan cara mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan seperti adanya kebijakan kuota, tarif dan regulasi non tarif lainnya yang berkaitan dalam proses perdagangan ekonomi global (Aida & Riyanto, 2021). Selain itu, dalam proses kebijakan liberalisme juga mencakup adanya pengurangan kontrol modal oleh pemerintah, deregulasi pasar, privatisasi perusahaan negara, pengurangan hambatan perdagangan, dan adanya keterbukaan akses pasar dan investasi dengan tujuan utama agar mampu mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini didukung berdasarkan prinsip perdagangan bebas yang menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang lebih efisien, spesialisasi produksi dan menciptakan keuntungan dengan adanya pertukaran antarnegara.

Sejak abad ke-20 liberalisme ekonomi telah menjadi dasar kebijakan ekonomi global terutama di negara-negara kapitalis maju, pesatnya perkembangan liberalisme perdagangan ini didukung melalui berbagai perjanjian internasional, seperti melalui General Agreement on Traffics and Trade (GATT) yang kini berubah menjadi World Trade Organization (WTO). Selain itu juga disebutkan dalam perjanjian integrasi ekonomi regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Agreement (NAFTA), Europe Union (EU), the Southern Part of South America (MERCOSUR), Central America (CARICOM) juga menyatakan adanya upaya sebuah negara untuk dapat meningkatkan kerja sama di tingkat regional (Wafik Azizah & Binar Nan Baik, 2024). Melalui dasar kebijakan yang tertulis dalam perjanjian internasional tersebut menekankan bahwa negara-negara di seluruh dunia dapat memanfaatkan pasar yang lebih luas melalui adanya liberalisme yang membuka akses perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing serta mendorong investasi asing. Namun, dalam penerapannya tidak ada menciptakan dampak positif saja, disatu sisi liberalisme justru memunculkan suatu dilema terutama pengaruhnya terhadap adanya ketimpangan atau kesenjangan sosial yang sering kali menjadi perdebatan yang kuat, terutama pada negara-negara kapitalis yang memiliki tingkat ketimpangan dalam pendapatan yang semakin tinggi.

Menurut Piketty dalam tesisnya yang berjudul *Capital in the Twenty-First Century* yang menyatakan ke khawatirannya bahwa semakin sempurna pasar kapital, maka akan semakin tinggi tingkat return on capital, dimana dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika rasio ini semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat ketimpangannya, karena kesenjangan sosial merupakan kelemahan yang melekat dalam sebuah sistem kapitalisme (Piketty et al., n.d.-a). Oleh karena itu, Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar yang kini telah menjadi isu penting dengan melalui fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pendapatan dan kekayaan pada banyak negara maju semakin meningkat, yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Secara historis, munculnya gelombang liberalisasi ekonomi ini dimulai pada tahun 1980-an melalui kebijakan Reaganomics di Amerika Serikat dan Thatch di Inggris. Dalam sebuah konsensus di Washington menjadi awal gelombang liberalisasi ini menyebar ke seluruh dunia. Munculnya mekanisme yang mengatakan bahwa melalui pasar bebas akan mampu memaksimalkan alokasi sumber daya serta adanya manfaat ekonomi yang akan didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat menjadi sebuah dasar keyakinan dalam kebijakan liberalisasi perdagangan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa data empiris yang terkait dari beberapa lembaga penelitian internasional justru menyatakan bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut tidak sepenuhnya menjamin manfaat dan dampak positif yang akan dirasakan dalam menggunakan kebijakan tersebut.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yameogo & Omojolaibi, 2021) Afrika hasilnya menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi melalui keterbukaan perdagangan dan investasi langsung secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sementara kualitas kelembagaan mengurangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dalam hal ini liberalisasi perdagangan, kualitas kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi memiliki peran dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam jangka panjang, namun liberalisasi perdagangan juga memiliki efek buruk dalam jangka pendek. Selain itu, kemiskinan belum menunjukkan tingkat yang signifikan dalam perubahan yang positif. Peningkatan kesenjangan ekonomi tidak hanya mengancam keterikatan sosial saja, namun juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Melalui Laporan Oxfarm 2023 mengungkapkan bahwa selama pandemi dan pasca pandemi Covid-19 justru

meningkatkan kekayaan para miliarder terutama di Amerika yang terus meningkat pesat, sementara sebanyak 263 juta orang harus jatuh ke dalam kemiskinan karena adanya kenaikan harga pangan (Christensen et al., n.d.). Melalui laporan ini mencatat adanya peningkatan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan sosial yang ekstrim terutama di negara maju kapitalis. Meningkatnya kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat ini dipengaruhi adanya ketimpangan tingkat pendapatan dimana kelompok orang kaya akan semakin kaya dan kelompok kalangan bawah akan semakin miskin.

Fenomena ini dapat dilihat melalui sudut pandang teoritis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran, seperti melalui teori dari Adam Smith dan John Locke yang mendukung kebijakan perdagangan bebas dengan peran pemerintah yang seminimal mungkin dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Karena mereka percaya bahwa dengan adanya liberalisme dalam perdagangan akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan bagi semua kelompok masyarakat (*trickle-down effect*). Namun, dalam teori liberalisme klasik dari Keynes dan Marxis menyatakan kritik dengan menegaskan bahwa mekanisme pasar cenderung akan memperbesar kesenjangan ekonomi di kelompok masyarakat miskin karena akumulasi pendapatan yang di dapatkan oleh kelompok masyarakat kelas atas. Melalui studi teoritis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan liberalisme ekonomi tergantung pada kebijakan mekanisme pasar yang digunakan oleh negara tersebut

Berdasarkan data empiris dan teoritis yang telah di berikan menunjukkan fakta bahwa adanya liberalisme perdagangan yang menawarkan akses pasar yang lebih luas, pengurangan kontrol modal dan minimnya peran pemerintah dalam perekonomian yang faktanya justru meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat kelas atas karena adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan dengan kelompok masyarakat bawah. Oleh karena itu, melalui penelitian ini melihat sistem liberalisme terutama di negara kapitalis cenderung memberikan dampak terhadap meningkatnya kesenjangan ekonomi masyarakatnya, dimana melalui indeks gini ratio yang dinyatakan dalam laporan World Inequty Report tahun 2022 menunjukkan bahwa negara kapitalis seperti amerika, inggris, perancis, bahwa pendapatan kelompok masyarakat kelas atas meningkat pesat dibandingkan kelompok masyarakat menengah kebawah yang justru menurun dan stagnan (Piketty et al., n.d.-b). Dengan demikian penelitian ini meninjau permasalahan dalam penggunaan kebijakan liberalisme yang berdampak pada terciptanya kesenjangan ekonomi di suatu negara khususnya negara dengan sistem kapitalis. Hal tersebut dibuktikan melalui berbagai studi komparatif dari berbagai negara kapitalis dan menggunakan data sekunder yang di analisis melalui teori empiris dan teoritis.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hubungan antara liberalisasi ekonomi dan kesenjangan sosial, dan beberapa studi terkini untuk mengevaluasi sejauh mana liberalisasi ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan sosial, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial di negara-negara kapitalis.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dengan metode studi literatur untuk memberikan sebuah gambaran secara umum dan mendalam mengenai topik yang dikaji. Dalam penelitian berbasis studi literatur ini juga dengan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data-data yang disajikan dari berbagai sumber literatur terdahulu. Analisis data penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, dimana fokus penelitian dengan model ini yaitu melalui pengumpulan data pustaka, membaca, dan pengelolaan data dari beberapa penelitian yang dikaji secara analitis, sistematis, kritis dan objektif. Sehingga menciptakan pemahaman secara mendalam dan bermakna mengenai permasalahan atau fenomena yang dikaji (Rusli, n.d.). Tujuan dari penggunaan metode tersebut untuk memahami adanya masalah atau fenomena ini secara lebih mendalam dengan memberikan deskripsi secara komprehensif mengenai kondisi yang di analisis yaitu tentang bagaimana akibat dari adanya liberalisme terhadap kesenjangan ekonomi yang ada di negara kapitalis.

Proses analisis kajian literatur dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi. Selanjutnya, pemilihan studi literatur yang relevan yaitu berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional dan jurnal internasional, laporan penelitian, penelitian terdahulu serta publikasi resmi dari lembaga terkait seperti OECD untuk menilai kredibilitas dan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Melalui pendekatan tersebut mampu memberikan solusi peneliti dalam memecahkan masalah yang dikaji dengan merujuk pada beberapa

teori yang relevan serta dengan temuan-temuan yang mendukung (Kholik Afandi, 2021). Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan dalam penelitian adalah dari data resmi OECD, World Inequality Database dan artikel terdahulu yang meneliti fokus serupa, contohnya melalui hasil penelitian dari negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Afrika dan Swedia kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi adanya dampak yang tercipta dengan adanya liberalisme terhadap kemunculan kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat di negara kapitalis berdasarkan data 10 tahun terakhir.

Dengan demikian, penelitian ini telah melalui tahap pemilihan studi literatur secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, metode metodologis dan tingkat relevansi dengan penelitian di negara kapitalis. Sehingga, penelitian ini mampu mengintegrasikan temuan secara empiris dan teoritis sekaligus untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berdampak dalam mengurangi kesenjangan di era ekonomi liberalis. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dan kontekstual mengenai hubungan sistem ekonomi yang liberal dalam menciptakan kesenjangan ekonomi di negara kapitalis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Liberalisme ekonomi merupakan suatu sistem perdagangan yang merujuk pada proses pengurangan dan penghapusan hambatan perdagangan antar negara, seperti ada tarif, kuota, subsidi dan regulasi non-tarif yang memiliki tujuan untuk menciptakan pasar global yang lebih kompetitif dan lebih terbuka. Dalam lingkup global, negara yang menganut ideologi kapitalisme. Individualism dan liberalism menjadi hal yang dianggap lumrah dalam dunia perdagangan internasional. Paham tersebut secara perlahan masuk ke dalam sistem perekonomian banyak negara khususnya Indonesia, melalui berbagai kebijakan juga mempengaruhi struktur ekonomi global untuk lebih mengandalkan mekanisme pasar, yang disisi lain kerap meningkatkan angka kesenjangan ekonomi dalam masyarakatnya. Dampak tersebut sering kali di rasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah di negara maju, terutama negara kapitalis.

Hal tersebut dapat di buktikan melalui data dari laporan World Inequality Report tahun 2022 ditemukan bahwa pada negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, persentase kekayaan yang dimiliki oleh 10% orang terkaya mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1980, seiring dengan gelombang liberalisasi yang masif. Sebaliknya, 50% populasi terbawah justru mengalami stagnasi bahkan penurunan pendapatan riil dalam periode yang sama.

**Tabel 1.** Rasio Gini Amerika Serikat

Indikator	Tahun Awal	Tahun Akhir	Perubahan/Tren
Gini AS	0.34	0.41	Meningkat sejak 1980-an
Rasio 10% teratas dan 10 % terbawah	7:1	9.6:1	Ketimpangan meningkat sejak tahun 1980
Kekayaan Global Top 10%	-	80,3%	Konsentrasi tinggi
Kekayaan Bottom 50 %	-	2%	Sangat rendah dan stagnan

Dari data rasio gini Amerika Serikat ditemukan bahwa Amerika Serikat mengalami peningkatan rasio Gini dari sekitar 0,40 pada tahun 1980 menjadi lebih dari 0,47 pada 2020, sebagaimana tergambar dalam grafik tren berikut. Data ini mencerminkan konsentrasi kekayaan yang semakin tinggi di kelompok 10% teratas populasi. Berdasarkan laporan *The Distribution of Household Income*, 2019 yang dirilis oleh *Congressional Budget Office (CBO)* pada tahun 2022, tercatat bahwa selama periode 1979 hingga 2019 terjadi peningkatan signifikan dalam ketimpangan pendapatan. Pendapatan rata-rata kelompok 20% tertinggi meningkat dari \$154.900 menjadi \$332.100 (kenaikan 114%), sementara kelompok 20% terbawah hanya meningkat dari \$16.300 menjadi \$23.800 (kenaikan 45%). Bahkan, rata-rata pendapatan kelompok 1% teratas mencapai \$2 juta, dan 0.01% teratas mencapai \$43 juta per tahun pada 2019 (CBO, 2022). Dari data tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara kapitalis dengan model liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era 1980-an mengalami peningkatan kesenjangan pendapatan yang signifikan. Reformasi deregulasi, pemotongan pajak, dan liberalisasi pasar modal menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dinikmati oleh kelompok kaya, sementara kelompok bawah tertinggal jauh. Hal ini memperkuat asumsi bahwa tanpa intervensi redistributif yang kuat, liberalisasi ekonomi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Fenomena ini diperkuat oleh argumen Piketty (2014), yang menyatakan bahwa dalam sistem kapitalisme liberal, *return on capital* (imbal hasil

atas modal) tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kekayaan semakin terpusat.

Kondisi seperti itu juga terjadi di Inggris, sejak masa pemerintahan Margaret Thatcher sudah mengadopsi liberalisasi ekonomi secara agresif. Berdasarkan laporan *Living Standards, Poverty and Inequality in the UK: 2023* dari Institute for Fiscal Studies (IFS), tingkat ketimpangan pendapatan di Inggris telah mengalami kenaikan tajam sejak 1980-an dan tetap tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Indikator Gini coefficient di Inggris sempat melonjak dari 0.26 pada akhir 1970-an menjadi sekitar 0.35 pada 1990-an, dan meskipun sempat mengalami fluktuasi, tetap berada di kisaran 0.34 pada tahun 2021–2022 (Ray-Chaudhuri et al., n.d.). Dari data tersebut menunjukkan bahwa Inggris sebagai negara kapitalis yang menerapkan liberalisme ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap munculnya kesenjangan ekonomi. Kenaikan Gini coefficient dan ketergantungan kelompok miskin pada bantuan sosial menunjukkan bahwa struktur ekonomi liberal di Inggris tidak secara otomatis memperbaiki distribusi kesejahteraan. Justru, tanpa kebijakan redistributif yang kuat, kesenjangan sosial cenderung meningkat dan bertahan dalam jangka panjang.

Namun, tidak semua negara melakukan liberalisasi akan mengalami peningkatan kesenjangan. Sebaliknya, yang dialami oleh negara Jerman memberikan contoh negara kapitalis dengan struktur pasar terbuka namun tetap mempertahankan sistem jaminan sosial yang kuat. Menurut *OECD Economic Survey: Germany 2023*, Gini ratio negara Jerman pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,296 lebih rendah dari rata-rata OECD sekitar 0,315 (*OECD Economic Surveys GERMANY, 2023a*). Jerman sebagai negara kapitalis yang menerapkan sistem ekonomi pasar terbuka berhasil menjaga tingkat kesenjangan sosial pada level yang relatif rendah dibandingkan rata-rata negara-negara OECD. Angka tersebut mengindikasikan bahwa liberalisasi ekonomi di Jerman tidak secara otomatis mendorong peningkatan ketimpangan, berbeda dengan tren yang terlihat di beberapa negara kapitalis lain seperti Amerika Serikat atau Inggris. Hal ini memperkuat asumsi bahwa peran negara dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan dan jaminan sosial yang kuat mampu menahan laju ketimpangan. Oleh karena itu, liberalisasi ekonomi di Jerman dapat dikatakan berdampak netral atau terkendali terhadap kesenjangan sosial, selama tetap diimbangi oleh kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal serupa juga terjadi pada negara Kanada. Negara Kanada tetap menjalankan sistem pasar bebas, akan tetapi juga menyediakan bantuan dan program sosial untuk kelompok yang memiliki penghasilan rendah. Menurut laporan *A Review of Canadian Homelessness Data (2023)* yang diterbitkan oleh Statistics Canada, terjadi penurunan proporsi penduduk yang pernah mengalami tunawisma dari 2,5% pada 2018 menjadi 2,2% pada 2021. Sementara itu, pengalaman *hidden homelessness* (tinggal sementara karena tidak punya tempat tinggal, seperti di rumah teman atau keluarga) juga menurun dari 14,5% menjadi 10,5% dalam periode yang sama (Byers et al., 2023). Laporan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perumahan sosial seperti *National Housing Strategy (NHS)*, yang menargetkan renovasi 300.000 unit dan pembangunan 160.000 rumah baru, telah memberikan dampak positif dalam mengurangi beban kepemilikan rumah dan akses terhadap hunian yang layak bagi kelompok rentan. Selain itu, strategi nasional *Reaching Home* memberikan bantuan langsung kepada komunitas lokal dan kelompok *Indigenous* untuk mencegah dan mengurangi tunawisma, termasuk penurunan tunawisma kronis sebesar 50% hingga tahun 2027–2028. Meskipun terdapat tantangan dalam pengukuran tunawisma akibat sifatnya yang episodik dan tersembunyi, data dari *Canadian Housing Survey (CHS)*, *Census*, dan *General Social Survey (GSS)* memberikan gambaran bahwa upaya sistemik Kanada dalam mengelola perumahan dan jaring pengaman sosial telah berdampak pada penurunan ketimpangan terkait hunian dan pendapatan. Sedangkan di negara Kanada menunjukkan bahwa sistem liberalisme yang disertai dengan intervensi negara dalam bentuk kebijakan perumahan sosial dan subsidi pengentasan kemiskinan justru mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka tunawisma dan peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan stabil, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hasil studi (Yameogo & Omojolaibi, 2021) yang meneliti beberapa negara di Afrika juga menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek liberalisasi perdagangan dapat memperburuk ketimpangan, terutama jika tidak diimbangi dengan reformasi kelembagaan dan perlindungan sosial. Selain itu, di negara Swedia yang dikenal menggunakan pendekatan *social democratic capitalism*. Liberalisasi perdagangan dan investasi berjalan secara beriringan dengan sistem kesejahteraan yang memiliki pondasi dengan sangat kuat. Berdasarkan data dari (World Bank, 2023) menunjukkan bahwa Gini ratio Swedia tetap dalam peringkat rendah, yaitu sekitar 0,28 pada tahun 2022. Sedangkan, laporan dari European Commission juga mencatat bahwa kebijakan redistribusi melalui pajak dan subsidi sosial mampu untuk mengurangi ketimpangan hingga

40% dari tingkat pra redistribusi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa liberalisasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan keadilan sosial, asalkan mendapat dukungan sosial yang tinggi. Ini menjadikan Swedia sebagai salah satu negara dengan sistem redistribusi paling efektif di dunia (OECD, 2018)

Untuk memperkaya perspektif dan menghindari generalisasi sempit, perlu ditambahkan ilustrasi dari negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, liberalisasi ekonomi juga membawa dampak serupa meskipun dalam skala dan bentuk yang berbeda. Studi oleh (Christianingrum et al., 2022) menunjukkan bahwa liberalisasi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Hal ini terjadi karena FDI cenderung terpusat di wilayah dengan infrastruktur yang sudah maju, meninggalkan daerah tertinggal semakin terpinggirkan. Selain itu, penelitian oleh Astriyany & Takahashi menemukan bahwa liberalisasi perdagangan menurunkan kesenjangan upah secara umum, namun liberalisasi FDI justru meningkatkan upah hanya untuk pekerja terampil, memperlebar jurang antara tenaga kerja terdidik dan pekerja informal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi di negara-negara kapitalis besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Afrika dan Swedia memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, liberalisasi berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi pasar, investasi asing, dan perdagangan internasional. Namun di sisi lain, tanpa adanya kebijakan redistributif dan proteksi sosial yang memadai, liberalisasi justru memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap *trickle-down economics*, yang dalam praktiknya gagal menjamin pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, melainkan cenderung menguntungkan pemilik modal dan korporasi besar.

Dengan demikian, baik di negara kapitalis maju maupun di negara berkembang, liberalisasi ekonomi memiliki potensi untuk mempercepat ketimpangan sosial jika tidak disertai dengan kebijakan distribusi yang kuat dan reformasi kelembagaan yang mendalam. Hal ini memperkuat argumen bahwa liberalisasi tidak dapat dianggap sebagai solusi otomatis untuk pertumbuhan yang inklusif. Negara perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih seimbang, termasuk penguatan pajak progresif, jaminan sosial universal, perlindungan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang merata antar wilayah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **Pembahasan**

Hasil dalam penelitian ini menegaskan bahwa liberalisasi ekonomi di negara-negara kapitalis tidak serta-merta menghasilkan kesejahteraan yang merata. Pada satu sisi, liberalisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi pasar, peningkatan investasi asing, dan ekspansi perdagangan. Namun, disisi lain, jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistributif dan regulasi yang kuat, liberalisasi justru memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan kritik terhadap teori *trickle-down economics* yang menyatakan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak otomatis "menetes ke bawah" kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, keuntungan cenderung terkonsentrasi pada kelompok elit ekonomi. Berdasarkan hasil analisis terhadap enam negara kapitalis yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Afrika dan Swedia dapat dilihat bahwa dampak dari liberalisasi ekonomi terhadap kesenjangan sosial yang ada di negara-negara tersebut sangat bergantung pada bagaimana masing-masing negara merancang dan menerapkan sistem perlindungan sosialnya. Liberalisasi ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar melalui deregulasi, privatisasi, dan keterbukaan terhadap perdagangan serta investasi asing. Namun, ketika penerapan kebijakan tersebut tidak diimbangi oleh intervensi negara dalam bentuk jaring pengaman sosial, hasilnya sering kali justru memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Amerika Serikat menjadi contoh nyata dari penerapan liberalisasi ekonomi yang intensif dan tidak diimbangi dengan sistem distribusi pendapatan. Sejak tahun 1980-an, kebijakan pro-pasar berorientasi pada pengurangan regulasi dan pemotongan pajak bagi korporasi besar sehingga menyebabkan ketimpangan meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan dari Congressional Budget Office (2022) menunjukkan bahwa antara tahun 1979 hingga 2019, pendapatan riil kelompok 20% teratas meningkat sebesar 114%, sedangkan 20% kelompok berpendapatan terendah hanya meningkat sekitar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi di Amerika Serikat secara sistematis lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat Amerika Serikat (CBO, 2022).

Di Inggris terjadi pola yang sama sejak masa pemerintahan Margaret Thatcher yang juga mengadopsi kebijakan neoliberalisme secara agresif, dan terjadi reformasi secara besar-besaran terhadap pasar tenaga kerja, privatisasi berbagai sektor publik, dan pengurangan belanja sosial menyebabkan

peningkatan Gini ratio secara signifikan. Menurut laporan Institute for Fiscal Studies (2023), Gini ratio Inggris naik dari sekitar 0,26 pada awal tahun 1970-an menjadi 0,34 dan pada tahun 2021-2022. Gini ratio Inggris masih tetap tinggi hingga saat ini, hal ini mencerminkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang cukup tajam (IFS, 2024).

Di sisi lain, Jerman memberikan gambaran yang berbeda mengenai bagaimana liberalisasi dapat dikombinasikan secara efektif dengan sistem perlindungan sosial. Meskipun Jerman adalah negara dengan sistem pasar terbuka, akan tetapi mereka tetap mempertahankan pendekatan sosial berbasis negara kesejahteraan. Berdasarkan OECD Economic Survey tahun 2023, gini ratio Jerman pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,296 yang lebih rendah dari rata-rata OECD sebesar 0,315. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kebijakan yang mencakup asuransi sosial universal, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap pekerja melalui undang-undang tenaga kerja yang kuat, mampu menekan dampak negatif yang terjadi akibat liberalisasi terhadap distribusi pendapatan (OECD Economic Surveys GERMANY, 2023b). Kanada juga menunjukkan pola yang sama dengan Jerman. Negara ini tetap menerapkan prinsip pasar bebas, akan tetapi tetap memberikan perhatian yang besar terhadap redistribusi melalui pajak progresif dan transfer sosial. Menurut laporan *A Review of Canadian Homelessness Data* tahun 2023, terjadi penurunan proporsi penduduk yang pernah mengalami tunawisma dari 2,5% pada 2018 menjadi 2,2% pada 2021. Sementara itu, pengalaman hidden homelessness (tinggal sementara karena tidak punya tempat tinggal, seperti di rumah teman atau keluarga) juga menurun dari 14,5% menjadi 10,5% dalam periode yang sama (Byers et al., 2023). Kanada menunjukkan bahwa sistem liberalisme yang disertai dengan intervensi negara dalam bentuk kebijakan perumahan sosial dan subsidi pengentasan kemiskinan justru mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka tunawisma dan peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan stabil, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berbeda dengan beberapa negara, Swedia merupakan model ideal dari sistem kapitalisme sosial-demokratis yang seimbang. Negara ini menjalankan liberalisasi perdagangan dan investasi, namun tetap mempertahankan struktur kesejahteraan yang kokoh. Menurut OECD Economic Survey tahun 2023, Gini ratio Swedia pada tahun 2022 tercatat di angka 0,28, dan kebijakan mengenai redistribusi melalui perpajakan dan subsidi sosial mampu mengurangi ketimpangan hingga 40% dari tingkat sebelum redistribusi. Hal ini menandakan bahwa negara yang memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial dapat tetap berpartisipasi aktif dalam ekonomi global tanpa mengorbankan kesetaraan sosial warganya (OECD Economic Surveys SWEDEN, 2023).

Temuan ini juga diperkuat oleh studi Yameogo 2020 yang menyatakan bahwa liberalisasi memang dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, jika tidak diimbangi dengan sistem distribusi yang adil dan kelembagaan yang kuat, liberalisasi justru dapat meningkatkan ketimpangan sosial. Hal tersebut memiliki pengaruh yang luas, bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik, seperti meningkatnya polarisasi politik, ketegangan sosial, dan menurunnya mobilitas ekonomi antar generasi. Dalam laporan Oxfam 2023 selama masa pandemi COVID-19 juga mencatat bahwa para miliarder dunia mengalami lonjakan kekayaan secara signifikan, sementara ratusan juta orang jatuh miskin yang diakibatkan oleh krisis harga pangan dan kehilangan pekerjaan. Ini menyoroti kegagalan sistem liberal dalam menjaga ketahanan sosial di masa krisis.

Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori *dual economy* oleh Lewis (1954), yang mana liberalisasi yang tidak disertai pemerataan ekonomi justru memperlebar jurang antara sektor modern yang padat modal dan sektor tradisional yang didominasi pekerja informal. Dalam konteks negara-negara kapitalis modern, dualisme ini mewujud dalam bentuk keterputusan antara kelompok ultra-kaya dengan masyarakat pekerja kelas bawah yang semakin rentan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan liberalisasi semata, melainkan juga memastikan adanya regulasi pasar yang adil, perlindungan terhadap pekerja, dan sistem distribusi kekayaan yang lebih merata.

Sebagai penyeimbang, negara harus mengimplementasikan kebijakan yang lebih mengedepankan keadilan sosial, seperti sistem pajak progresif, transfer sosial, dan layanan publik yang inklusif. Selain itu, penguatan institusi publik yang transparan dan akuntabel sangat krusial untuk memastikan bahwa liberalisasi tidak menjadi alat akumulasi kekayaan oleh segelintir elite, melainkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan berpihak pada kelompok rentan, liberalisasi ekonomi dapat diarahkan untuk tidak hanya memacu pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial dalam jangka panjang.

Dengan demikian, liberalisasi ekonomi bukanlah kebijakan yang secara otomatis membawa kesejahteraan merata. Tanpa regulasi dan perlindungan sosial yang kuat, liberalisasi justru berisiko memperburuk kesenjangan sosial dan melemahkan kohesi masyarakat. Oleh karena itu, perlu pendekatan kebijakan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial melalui penguatan institusi publik, sistem pajak progresif, dan distribusi layanan sosial yang merata.

## SIMPULAN

Liberalisasi ekonomi membawa dampak yang bertolak belakang terhadap kesenjangan sosial di negara-negara kapitalis. Di satu sisi, keterbukaan dalam perdagangan dan arus investasi asing memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, efisiensi pasar dan integrasi global, seperti terlihat pada kasus Amerika Serikat dan Inggris. Namun di sisi lain, tanpa diimbangi kebijakan sosial yang adil dan inklusif, liberalisasi justru cenderung memperlebar kesenjangan pendapatan dan memperkuat dominasi kelompok elite atas masyarakat berpenghasilan rendah, hal tersebut didukung oleh penelitian Piketty yang menemukan adanya ketimpangan structural dalam sistem kapitalis.

Amerika Serikat dan Inggris menjadi contoh nyata dari penerapan liberalisasi agresif yang tidak diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh segelintir kelompok kaya, sementara masyarakat kelas bawah menghadapi stagnasi bahkan kemunduran kesejahteraan. Sebaliknya, negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Swedia membuktikan bahwa liberalisasi tidak selalu identik dengan peningkatan ketimpangan. Dengan sistem jaminan sosial yang kuat, kebijakan pajak progresif, dan distribusi kesejahteraan yang merata, negara-negara ini mampu menekan dampak negatif liberalisasi. Swedia, khususnya, berhasil menurunkan ketimpangan melalui mekanisme redistribusi yang efektif dan berkelanjutan.

Temuan serupa juga tercermin di Indonesia, di mana liberalisasi ekonomi, terutama dalam bentuk investasi asing langsung, tanpa pemerataan pembangunan dan penguatan kelembagaan, justru memperbesar kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok pekerja, terutama antara tenaga kerja terampil dan pekerja informal.

Oleh karena itu, liberalisasi ekonomi tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk mencapai pembangunan yang merata. Tanpa peran aktif negara dalam melindungi kelompok rentan dan menjamin distribusi kesejahteraan, kebijakan pasar bebas justru dapat memperdalam ketimpangan sosial. Diperlukan pendekatan kebijakan yang menyeimbangkan efisiensi pasar dengan prinsip keadilan sosial, melalui reformasi perpajakan yang adil, jaminan sosial universal, serta pembangunan yang merata antarwilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N., & Riyanto, F. D. (2021). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Indonesia: Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan pada Mitra Dagang Utama. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 243–253. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.107>
- Astriyani, & Takahashi, S. (n.d.). TRADE LIBERALIZATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT LIBERALIZATION, AND WAGE INEQUALITY IN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1920>
- Byers, Jing., Christophe, Chanel., McDermott, Sarah., & Simeu, Natalie. (2023). *Market basket measure research paper : child care expenses*. Statistics Canada = Statistique Canada.
- CBO. (2022). *The Distribution of Household Income*. [www.cbo.gov/publication/58353](http://www.cbo.gov/publication/58353)
- Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., & Putaturo, C. (n.d.). *Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality*.
- Christianingrum, R. A. N. A. D. D. R., Dwi Resti Pratiwi, & Marihot Nasution. (2022). Analisis APBN. In | *Jurnal Budget* (Vol. 7, Issue 1). Pusat Kajian Anggaran.
- IFS. (2024). *Living standards, poverty and inequality in the UK*. <https://ifs.org.uk/living-standards-poverty-and-inequality-uk>
- OECD. (2018). *“Sticky floors” and “sticky ceilings”-How parents pass on privilege and disadvantage to their children*.
- OECD Economic Surveys GERMANY. (2023).
- OECD Economic Surveys SWEDEN. (2023).
- Kholik Afandi, N. (2021). *Sultra Educational Journal (Seduj) Literature Review is A Part of Research*. 1(3). <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>
- Piketty, T., Saez, E., Zucman, G., Duflo, E., & Banerjee, A. (n.d.). *INEQUALITY REPORT 2022*.

- Ray-Chaudhuri, S., Waters, T., Wernham, T., & Xu, X. (n.d.). *Institute for Fiscal Studies Living standards, poverty and inequality in the UK: 2023 IFS Report R265*. <http://www.ifs.org.uk/>
- Rusli, M. (n.d.). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. <http://repository.uin-wafik.ac.id/>
- Wafik Azizah, & Binar Nan Baik. (2024). MEMAHAMI LIBERALISASI PERDAGANGAN: DAMPAK DAN IMPLIKASINYA DALAM KONTEKS EKONOMI GLOBAL. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 1(4), 251–265. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3333>
- World Bank. (2023). *Gini index - Sweden*. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=SE>
- Yameogo, C. E. W., & Omojolaibi, J. A. (2021). Trade liberalisation, economic growth and poverty level in sub-Saharan Africa (SSA). *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 34(1), 754–774. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1804428>

